

BUDAYA POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK¹

Untuk memahami dan mengerti budaya komunikasi politik secara utuh terlebih dahulu harus memahami komunalitas budaya Indonesia yang terhampar dari sabang sampai merauke dalam rentang sejarah yang panjang. Secara sosiologis, budaya Indonesia dibangun oleh berbagai sub budaya yang dalam konsepsi politik Indonesia terangkum dalam wadah Bhineka Tunggal Ika.

Budaya berkenaan dengan cara manusia hidup, dan diartikan sebagai tatanan kehidupan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. (Mulyana, ed, 2001:18). Budaya menampakkan dirinya dalam realitas sosial yang teraktualisasi dalam cara berfikir dan bertindak termasuk dalam cara berinteraksi dengan menggunakan proses komunikasi. Budaya berada pada ranah yang kompleks, sebab suatu budaya eksistensinya terdiri dari sub-sub budaya lain, misalnya, budaya Indonesia dibangun oleh puluhan bahkan ratusan budaya yang bersifat etnik, seperti budaya Sunda, Jawa, Bugis, Minang, Aceh dan seterusnya.

Secara teoritik untuk menelusuri apa dan bagaimana budaya komunikasi politik terlebih dahulu harus mengetahui dan faham budaya politik Indonesia, pembahasan mengenai budaya politik secara imperatif membahas tentang sistem ideologi, karena pada dasarnya budaya politik dan ideologi bagaikan sekeping mata uang dengan kedua sisinya. Ideologi dipakai untuk mencerminkan suatu pandangan hidup atau sikap mental, secara khusus ideologi diartikan sebagai suatu perangkat pandangan serta sikap-sikap dan nilai-nilai, atau suatu orientasi berfikir tentang manusia dan masyarakat. (Widjaja, 1988:3)

Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-cirinya yang khas. Istilah budaya politik yang dipakai dalam pembahasan ini mencakup masalah-masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparatur pemerintah, serta gejolak-gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Bagaimana sikap, kepercayaan, dan perasaan seseorang terhadap sistem politik sebenarnya ditentukan oleh bagaimana hubungan antara budaya politik itu sendiri dengan sistem politik yang terbangun. (Sjamsuddin, 1993:90).

¹ Disampaikan pada kuliah Komunikasi Politik pertemuan ke-12, kelas IK-3, IK-4, IK-5 Ilmu Komunikasi UNIKOM

Menurut Kantaprawira (2002: 37-39), budaya politik Indonesia dapat dipotret melalui 5 dimensi, yaitu: pertama, konfigurasi sub kultur di Indonesia yang menampilkan "wajahnya" beraneka ragam. Keragaman ini pada gilirannya membawa pengaruh terhadap identitas budaya Indonesia, dalam arti budaya Indonesia tidak berdiri sendiri, namun merupakan himpunan budaya yang tumbuh subur di nusantara dalam ruang dan waktu yang sangat panjang.

Kedua, budaya politik Indonesia yang bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak. Ini mencerminkan dualitas masyarakat Indonesia dalam mengartikulasikan budaya politiknya pada wilayah negara. Satu pihak masyarakat yang masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya, yang hal ini dimungkinkan oleh isolasi dari budaya luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial lainnya. Sedangkan di pihak lain terutama kaum elitnya, sungguh-sungguh mencerminkan partisipan yang aktif, karena dimungkinkan telah bersentuhan dengan pendidikan barat. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada pada level budaya politik yang bersifat parokial-kaula.

Ketiga, sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikator-indikator berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu. Simbol-simbol ini masih terus mencengkram wataknya terutama terlihat pada budaya politik yang tercermin dalam struktur vertikal di masyarakat di mana usaha gerakan kaum elit langsung mengeksploitasi dan menyentuh sub kultur sosial dan sub kultur untuk tujuan perekrutan dukungan.

Keempat, kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhkan sikap paternalisme dan sifat primordial. Sebagai indikatornya dapat disebutkan antara lain, bapakisme, dan sikap asal bapak senang. Di Indonesia, budaya politik tipe parokial-kaula lebih mempunyai keselarasan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan pada proses output dari penguasa.

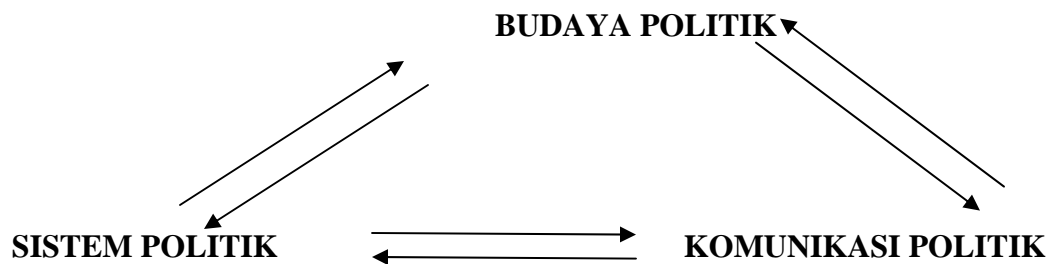
Kelima, dilema interaksi tentang introduksi modernisasi dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. Beberapa waktu yang lalu apa yang dinamakan dengan modernisasi masih diperdebatkan dengan cara mengisolasi diri. Sedangkan disisi lain modernisasi diharapkan dapat menumbuhkan sikap kelugasan, rasionalitas, dan objektivitas dalam menilai suatu persoalan politik.

Budaya dan komunikasi seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan dan komunikasi politik salah satunya dipengaruhi oleh faktor budaya yang dianut serta proses komunikasi politik yang pernah dilaluinya, artinya bahwa dengan menggunakan konsep komunikasi dan kebudayaan bahwa komunikasi politik juga pada dasarnya merupakan bagian dari, dan dipengaruhi oleh budaya politik suatu masyarakat (Muhtadi, 2008:27) dan dari kelima potret budaya politik masyarakat Indonesia ini pada akhirnya menjadi pijakan dalam cara berfikir, bertindak dan persepsi alam sadarnya (*cognitif perception*) yang terimplementasikan dalam budaya komunikasi politik di Indonesia. Sikap paternalistik dalam berpolitik mengakibatkan budaya komunikasi politik menjadi tidak terbuka, karena keengganan masyarakat menyinggung perasaan orang yang dianggap berpengaruh dan kharismatik.

Menurut Rush dan Althof (Muhtadi, 2008:27-28), mengatakan bahwa:

'Komunikasi politik-transmisi informasi yang relevan secara politis dari suatu bagian sistem kepada sistem yang lainnya, dan antara bagian sistem politik kepada sistem politik yang lainnya merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik; dan proses sosialisasi, partisipasi, serta rekrutmen politik bergantung pada komunikasi

Secara sederhana unsur-unsur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Budaya komunikasi politik pada kehidupan bernegara di Indonesia berkaitan dengan kampanye, egitasi, dan propaganda. Sampai tahun 2002 calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur, calon Bupati, calon dekan, calon rektor, dan pejabat-pejabat lainnya yang memerlukan pemilihan tidak pernah melakukan kampaye secara terbuka. Pada umumnya para calon tersebut tidak menampakkan ambisinya terhadap kekuasaan. Dalam alam pikiran kebanyakan orang Indonesia, terutama orang Jawa, mencari kekuasaan dengan faktor-faktor empiris adalah sesuatu hal yang konyol. Orang yang akan memperoleh kekuasaan akan

mendapat panggilan atau mandat cahaya biru bundar yang dinamakan teja. Berdasarkan hal ini, kekuasaan itu harus terpusat dan tidak boleh dibagi-bagi, sehingga mempunyai kecenderungan yang paternalistik dan kharismatik (Arifin, 2003: 199).

Dari mitos ini, lahirlah sikap bahwa bukanlah calon penguasa atau calon pemimpin yang harus aktif berkampanye untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan sebaliknya calon penguasa itu harus tenang-tenang saja, dan rakyatlah atau perwakilan dari rakyat yang ramai-ramai memintanya. Proses ini sebagaimana terjadi di panggung politik Indonesia era Soeharto, dimana ia diminta oleh rakyat atau perwakilan rakyat untuk menjadi Presiden meskipun itu cenderung diskenariokan.

Jika seorang pemimpin telah dipilih, maka ia memperoleh mandat penuh dan dipandang sebagai suatu kepercayaan atau amanah. Konsep mandataris sebagaimana yang dikenal pada UUD 1945 menimbulkan anggapan bahwa sangat kurang etis atau kurang layak, jika kekuasaan yang diserahkan oleh rakyat kepada mandataris, kemudian dipertanyakan, dipersoalkan, atau digugat secara terbuka dimuka umum. Dari pola pikir ini, kemudian lahir budaya komunikasi politik yang tidak terlalu terbuka pada kritik.

Terdapat ciri-ciri umum yang berkenaan dengan budaya komunikasi politik di Indonesia, antara lain (1) budaya komunikasi politik Indonesia cenderung tidak terbuka, terutama pada kritik meskipun dianggap konstruktif, (2) terbentuk budaya komunikasi politik yang sulit terus terang sehingga komunikasi politik penuh dengan penghalusan (*eufemisme*), (3) meskipun kritik diperbolehkan, tetapi gagasan kritik sosial tersebut disampaikan secara simbolik dan teaterikal, bentuknya harus sopan, halus, tidak agresif, dan disampaikan melalui medium canda gurau.

Meskipun demikian, memasuki era reformasi dengan segala kebebasannya budaya komunikasi politik cenderung mengalami pergeseran. Saat ini, dengan mengedepankan demokratisasi, maka budaya komunikasi politik cenderung terbuka, transparan, rasional serta dapat disampaikan melalui cara-cara yang terbuka seperti melalui media massa.